

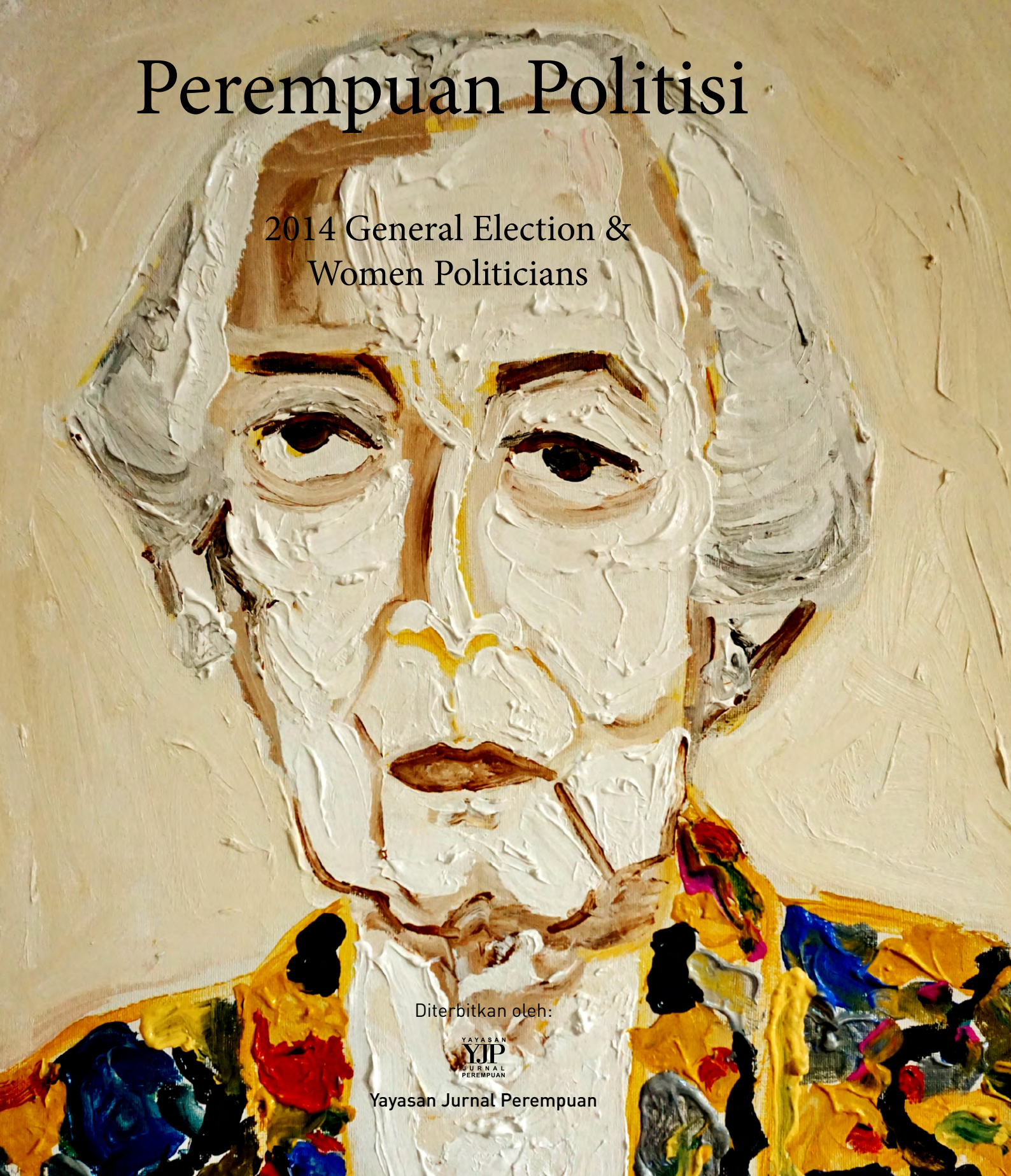
# Perempuan Politisi

2014 General Election &  
Women Politicians

Diterbitkan oleh:

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan



# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp.9200,- Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya beroleh kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 sahabat Jurnal Perempuan. Gabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp. 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan dan Jurnal Perempuan Muda secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- BCA KCP Menteng a.n Gadis A. Effendi, No. Rekening: 7350454416**

**- Bank Mandiri cabang Tebet Raya a.n Yayasan Jurnal Perempuan, No. Rekening 124-00-0497988-7**

(Mohon bukti transfer difaks ke 021 83706747, attn: Andri Wibowo/Gerry)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

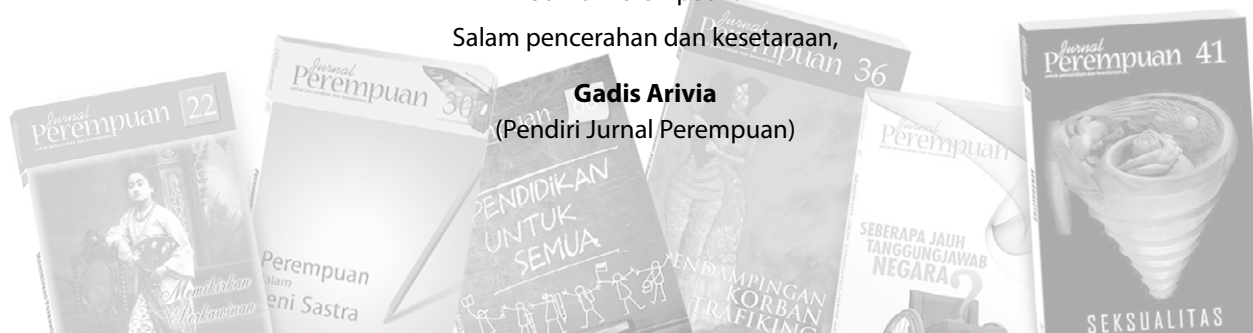
Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Mariana Amiruddin (Hp 08174914315, email: [mariana@jurnalperempuan.com](mailto:mariana@jurnalperempuan.com)) dan Deedee Achriani (Hp 0818730289, email: [deedee@jurnalperempuan.com](mailto:deedee@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada setiap tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Melli Darsa, S.H., LL.M.  
Mari Elka Pangestu, Ph.D.  
Svida Alisjahbana

**PEMIMPIN REDAKSI**

Dr.Phil. Dewi Candraningrum

**DEWAN REDAKSI**

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)  
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)  
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)  
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)  
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)  
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)  
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)  
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)  
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies, University of Western Australia)

Prof. Rachmi Diyah Larasati (Budaya & Perempuan, University of Minnesota)

Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)

Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)

Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)

Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)

Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)

Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)

Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

**REDAKSI PELAKSANA**

Elisabeth Anita Dhewy Haryono

**SEKRETARIS REDAKSI**

Andi Misbahul Pratiwi

**SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN**

Himah Sholihah  
Andri Wibowo  
Hasan Ramadhan  
Abby Gina Boangmanalu

**DESAIN & TATA LETAK**

Agus Wiyono

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Lontar No. 12 - Menteng Atas,  
Setiabudi - Jakarta Selatan 12960  
Telp. (021) 8370 2005 (hunting)  
Fax: (021) 8370 6747  
Email: [yjp@jurnalperempuan.com](mailto:yjp@jurnalperempuan.com)  
[redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)

**WEBSITE:**

[www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)

Cetakan Pertama, Mei 2014



**FORDFOUNDATION**

## Daftar Isi

<b>Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi"</b> .....	iii-iv
<b>Artikel / Articles</b>	
• Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i> .....	81-91
<i>Baiq L.S.W. Wardhani</i>	
• Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i> .....	93-101
<i>Partini</i>	
• Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i> .....	103-115
<i>Shelly Adelina &amp; Ani Soetjipto</i>	
• Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i> .....	117-127
<i>Aditya Perdana</i>	
• Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i> .....	129-143
<i>Nuri Soeseno</i>	
• Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i> .....	145-151
<i>Any Sundari</i>	
• Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i> .....	153-160
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i> .....	161-164
<i>Dewi Candraningrum</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	165-166
<b>Profil / Profile</b>	
• Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja? .....	167-170
<i>Mariana Amiruddin</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i> .....	171-173
<i>Astuti Parengkuh</i>	

## “Kursi”

Pemimpin Redaksi melukis “Kursi” untuk perempuan dalam sampul wajah *Jurnal Perempuan* Edisi 81 kali ini dengan akrilik di atas kanvas berukuran 60x90 cm. Transformasi kata “kursi” sebagai sebuah metafora memiliki makna penting bagi perempuan apabila dikaitkan dengan “kekuasaan”. Rata-rata perempuan menempati “kursi” parlemen di seluruh dunia masih sangat rendah, yaitu 20,9 persen. Menurut pasal 55 dalam Undang-Undang Pemilu No 8/2012 diwajibkan paling tidak ada tiga kandidat perempuan dalam daftar yang dipilih partai politik. Partai politik akan dilarang mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) apabila tidak memenuhi kuota ini. Setelah Pemilu 2009 kuota perempuan yang menduduki kursi parlemen belum mencapai 30 persen tetapi hanya 18,2 persen. Data KPU 2014 menunjukkan hanya sekitar 747 perempuan dari sekitar 2465 caleg perempuan yang merupakan kader, sisanya 1718 perempuan bukan merupakan kader partai (merupakan agregasi dengan latar belakang pengusaha, swasta, profesional, artis, selebriti, aktivis, dinasti politik, dan lain-lain). Daftar Calon Tetap (DCT) DPR RI yang diajukan parpol peserta pemilu 2014, terdapat peningkatan jumlah caleg perempuan dibanding pemilu 2009. Pada pemilu 2009 caleg perempuan mencapai 30 persen, sementara tahun 2014 ini menjadi 37 persen. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Pembina Pemilu memberikan perhatian serius pada masalah ini dan mewajibkan seluruh partai politik untuk dapat memenuhi kuota ini, baik level nasional maupun daerah.

Mempromosikan dan memperjuangkan kesetaraan dalam arena politik dan legislasi dalam masyarakat dan kehidupan bernegara tidaklah mudah. Dalam buku terbaru yang diedit oleh Sasha Roseneil *Beyond Citizenship? Feminism and the Transformation of Belonging* yang dipublikasi oleh Palgrave MacMillan pada Maret 2013 ini diungkapkan pelbagai penelitian bagaimana strategi

kenegaraan banyak menemu kegagalan karena dia dibangun dari asumsi-asumsi patriarki. Teori dasar kewarganegaraan (*citizenship*) masih dan terus berbasis patriarki. Kajian feminisme masih banyak yang ragu-ragu untuk terlibat dalam konsep kewarganegaraan yang berbasis patriarki tersebut. Kelemahan mendasar adalah bagaimana perempuan paling miskin tidak memiliki kesadaran kewarganegaraan karena negara sama sekali tidak menguntungkan bagi mereka, alih-alih memberikan kebutuhan dasar (*provision*) sebagai warga negara. Maka perempuan dalam ceruk ini pun juga tidak mengenal hak (*right*) dan partisipasi (*participation*) sebagai warga-negara karena kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi oleh negara. Dalam kajian feminisme kewarganegaraan yang setara adalah kewarganegaraan yang berdasarkan pada perbedaan pengalaman antara perempuan, laki-laki, dan minoritas seksual—dan negara dalam hal ini membangun strategi politiknya berdasarkan perbedaan tersebut. Selama ini yang berlaku di banyak negara adalah bahwa semua warga negara adalah sama. Asumsi sama ini dicurigai sebagai berjenis kelamin laki-laki. Dus, jamak apabila perempuan dan minoritas seksual tak sungguh-sungguh merasa memiliki negara atau dipenuhi kewarga-negaraannya oleh negara. Dus, jamak pula apabila peradaban kita minim perempuan politisi.

Membongkar konsep kewarganegaraan yang maskulin membutuhkan analisis yang kompleks dan tidak parsial. *Stereotype* dan ketidaksetaraan telah berkembang dan tumbuh menjadi sistem tersendiri. Inisiatif untuk membongkar ini adalah jangka panjang dan memakan waktu lebih dari beberapa dekade. Strategi untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam kehidupan politik dan kenegaraan di Indonesia dapat dijabarkan dalam beberapa langkah berikut ini: 1) merujuk pada komitmen internasional; 2) representasi kuota dan langkah afirmatif bagi kuota perempuan di par-lemen dan legislatif; 3) reformasi legislatif dalam menjaga kesetaraan hak antara laki-laki, perempuan dan minoritas seksual;

4) aksi afirmasi untuk mengatasi dis-paritas gender dalam politik, terutama partai politik. Karena partai politik adalah penjaga gawang demokrasi, maka perlu diusahakan ketiga perihal berikut dalam partai politik: 4a) kuota voluntir untuk partisipasi perempuan dalam struktur partai politik; 4b) *Outreach* partai politik pada pemilih perempuan; 4c) memperkuat dialog publik dan dialog antar dan inter-partai. 5) Partisipasi politik tidak hanya terbatas pada partai politik, tetapi perempuan dapat berpartisipasi dalam beberapa aspek elektoral secara independen, misalnya dalam organisasi masyarakat sipil. Jaringan perempuan, NGO, dan media dapat menyediakan perempuan akses untuk meningkatkan partisipasi

politik, yaitu dengan memberikan fokus pada lima perihal berikut: 5a) kampanye publik dan dukungan bagi keterlibatan politik perempuan; 5b) monitoring gender pada arus politik: bagaimana kualitas laki-laki dan perempuan dalam aktivitas politik dan apakah minoritas seksual mendapat hak, akses dan partisipasi politiknya secara penuh sebagai warga-negara; 5c) mendukung kelahiran generasi baru perempuan politisi; 5d) bekerjasama dengan laki-laki sebagai mitra dalam mempromosikan kesetaraan berpolitik; 5e) mereduksi diskriminasi gender dalam informasi media. Dan lain-lain. Kursi dan atau kekuasaan, pada akhirnya, harus dibagi rata, jika ingin setara, jika ingin adil. **(Dewi Candraningrum)**

---

Baiq L.S.W. Wardhani, FISIP Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No. 4-6, Mulyorejo, Jawa Timur 60115. Telp. : (031) 5914042

**Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma *Inclusive Citizenship***

**Status of Women as Citizen in the Paradigm of *Inclusive Citizenship***

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 81-91, 39 daftar pustaka.

Political arena has witnessed the masculinization of women's role in the public. The tendency to give the public to men has made women unable to express their ideas in full engagement as equal citizen. Involving back women into the discourse of the state is a form of defeating the myth that women are irresponsible citizens. Irresponsibility of women is the reversal effect of political exclusion of female's voices under the regimentation of male-based polity. This paper will investigate the status of women specifically under the paradigm of active and inclusive citizenship.

Keywords: citizenship status, women, inclusive citizenship, Africa, Indonesia.

Arena politik menjadi saksi terjadinya maskulinisasi peran publik. Kecenderungan untuk menyerahkan ruang publik pada pria menyebabkan perempuan tidak memiliki ruang yang cukup di dalam gagasan-gagasan kenegaraan. Melibatkan perempuan secara aktif sebagai warga negara menegaskan kembali peran perempuan sebagai warga negara yang bertanggungjawab, dengan menepis konstruksi sosial mengenai pemahaman tradisional relasi gender. "Ketidakbertanggungjawaban" perempuan dalam ruang publik merupakan konsekuensi dari tidak diakuiannya peran perempuan sebagai warga negara aktif, yang secara sistematis dieksklusi dari sistem patriarkal yang mendominasi negara. Tulisan ini mengetengahkan bagaimana status perempuan dalam paradigma kewarganegaraan aktif dan inklusif.

Kata kunci: status kewarganegaraan, perempuan, kewarganegaraan inklusif, Afrika, Indonesia.

---

Partini, FISIPOL Universitas Gajah Mada. Jl. Sosio Humaniora No.1, Bulaksumur Yogyakarta 55281 Indonesia. Telepon: +62 (0)274 548510 (Hunting), Fax: +62 274 563212

**Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia**

**Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 93-101, 14 daftar pustaka.

Women's participation in politics is the manifestation of the citizenship right fulfillment. Women as well as vulnerable groups as citizens have the right to improve their existence in politics. The rights that attach to women as citizens hopefully can make them not only as the vote-getter or political parties' participants but also as those being elected and exercise policy. Politic is genderless but politic system is constructed mostly by men. And women are lacking confidence within this culture of politic. It then deteriorates the stigma that women are unable and having no capacity to compete with men. Although women are legal citizens but the culture of politic is neither friendly to women nor conducive to feminine traits. The electoral process in citizenships system hopefully does not only create the man-represented view, but also a transformation process between the political party and the women platform.

Keywords: political participation, citizenship, discrimination.

Partisipasi politik perempuan merupakan manifestasi pemenuhan hak kewarganegaraannya. Perempuan sebagai Warga Negara punya hak untuk melakukan perbaikan kehidupan di ranah politik, sehingga perempuan dan kelompok minoritas tidak perlu memperoleh perlakuan diskriminatif. Hak yang melekat pada kewarganegaraan perempuan, diharapkan bisa menjadi pelaku, pemeran, pembuat dan pembentuk kebijakan dan bukan hanya sebagai pemilih dan pendongkrak suara parpol, sehingga partisipasi bersifat dinamis dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pendukung kepentingan orang lain. Politik tidak berjenis kelamin, tetapi bangunan sistem politik dikonstruksi secara maskulin. Ini menguatkan stigma bahwa perempuan tidak punya kapasitas untuk bersaing dengan laki-laki. Budaya politik belum kondusif, belum ramah perempuan meski perempuan sebagai warga negara yang sah. Proses elektoral dalam sistem kewarganegaraan diharapkan tidak sekadar menghasilkan wacana keterwakilan, tetapi sebuah proses transformasi antara parpol dan perempuan.

Kata kunci: partisipasi politik, kewarganegaraan, diskriminasi.

---

Shelly Adelina & Ani Soetjipto, Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia. Gedung Rektorat UI, Lantai IV, Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya no. 4 Jakarta 10430, telp: 021-3160788, 021-3907407, faks. 021-3907407

**Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender**

**Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 103-115, 4 tabel, 21 daftar pustaka.

Analysis of the gender strategy in the three largest political parties which dominate the legislative period 2009-2014, namely the Democratic Party, the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) shows several findings that can be reflected to travel to face election. First, third parties accounted for the most number of women seats in the national parliament. Second, as the dominant parties through the fractions in the legislature, three showed no provisions regarding how the policies and strategies of political parties in efforts to achieve gender equality and gender mainstreaming strategies not found in political parties. Third, strategies that are present in the party institutions only tangible Department of Women as women focal point. Beyond that, the strategy of increasing the representation of women is based on justice, equality, and gender equity was absent.

Keywords: gender mainstreaming strategy, politics interest, political parties, representation of women.

Analisis tentang strategi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi Pemilu. Pertama, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. Kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender, dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik. Ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. Di luar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen.

Kata kunci: kepentingan politik, strategi pengarusutamaan gender, partai politik, representasi perempuan.

---

Aditya Perdana. Faculty of Economics & Social Science Univ Hamburg dan FISIP Univ Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

## **Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik**

### **Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 117-127, 3 tabel, 19 daftar pustaka.

This article describes how seven female activists from civil organizations participate in 2004 and 2009 elections. On the frame of the implementation of women's representation in parliament that has been started since 2004 election, this article unearths women's representation movement based on the actors' experiences to participate in election. Using case study method and analysis with process tracing, this article argues that women activists, who participated in two elections, have contributed to implement women's representation into their political parties and parliament.

Keywords: female activists, legislative, party, region.

Artikel ini mendeskripsikan bagaimana ketujuh aktivis organisasi masyarakat sipil perempuan berpartisipasi dalam pemilihan umum di tahun 2004 dan 2009. Dalam kerangka implementasi keterwakilan perempuan di parlemen yang sudah dimulai sejak Pemilu 2004, artikel ini ingin merefleksikan gerakan keterwakilan perempuan berdasarkan pengalaman aktivis perempuan organik yang mengikuti pemilu. Dengan menggunakan metode studi kasus dan analisis melacak proses, artikel ini berpendapat bahwa aktivis perempuan yang berpartisipasi dalam dua pemilu tersebut mampu berkontribusi dalam mengimplementasikan keterwakilan perempuan di partai politik mereka dan parlemen.

Kata kunci: aktivis perempuan, legislatif, partai, daerah pemilihan.

---

Nuri Soeseno. Pusat Kajian Politik, FISIP Universitas Indonesia. Kampus UI Depok 16424, Telp. +62 21 78849018, Fax. +62 21 78849019

## **Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif**

### **Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 129-143, 3 tabel, 21 daftar pustaka.

Women's representation in parties and legislative institution is closely related to Indonesian's party typology as office seekers. It charted descriptive mandate to fulfill 30% quote of women's representation in General Election 2014—not necessary representing women's critical agenda. The phenomena of female legislators working previously as celebrities, actress, singers, or coming from political dynasty is the consequence of office seekers parties. It does not then guarantee the promotion, empowerment and protection of women's critical issues in societies as they are not representing women in general substantively. It is necessary to create female critical actors coming to office in political parties to succeed feminist agenda.

Keywords: female politician, party, general election, descriptive and substantive representation.

Keterwakilan perempuan di dalam partai dan lembaga legislatif terkait erat dengan tipologi sistem kepartaian yang 'office seekers'. Keterwakilan perempuan dalam partai politik dan lembaga legislatif masih bersifat deskriptif: untuk memenuhi persyaratan kuota 30 persen dalam Pemilu 2014. Munculnya fenomena caleg selebriti, artis, dinasti politik, dll merupakan konsekuensi kepartaian yang berorientasi mengejar jabatan. Tercapainya *critical mass* (30 persen anggota legislatif perempuan) di lembaga-lembaga politik (partai dan parlemen) bukan jaminan munculnya keterwakilan perempuan yang substantif. Dibutuhkan kehadiran *critical actor* untuk mengubah keterwakilan deskriptif menjadi substantif.

Kata kunci: perempuan politisi, partai, pemilu, keterwakilan deskriptif dan substantif.

---

Any Sundari. Rifka Annisa Women's Crisis Center, Yogyakarta. Jl. Jambon 4 No. 69A, Kompleks Jatimulyo Indah, Daerah Istimewa Yogyakarta 55241

## **Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta**

### **Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 145-151, 1 gambar, 5 daftar pustaka.

Women's participation in politics is a crucial discourse in Indonesia. Affirmative action policy by providing 30% quota for women in parliament is a positive thing enforcing women to enter into political contestation. However, encouraging women to engage in politics is not easy task. Politics from the outset has been identified as a distinctive world of men and women experienced constant domestication systematically orchestrated by the state. *Ibuisism* ideology caused women to experience a variety of vulnerabilities and bundle of violences in formal politics. To revive women politically especially at the community level, women can learn to negotiate outside of formal politics to voice their representation.

Keywords: female politics, participation, community.

Partisipasi perempuan dalam politik merupakan diskursus penting di Indonesia. Kebijakan afirmatif kuota 30% kepada perempuan di parlemen merupakan hal positif guna mendorong perempuan berkontestasi. Namun, mendorong perempuan untuk berpolitik bukanlah perkara mudah. Politik sejak awal sudah diidentikkan sebagai dunia yang laki-laki dan negara secara sistematis melakukan domestifikasi perempuan dalam rumah. Ideologi *ibuisme* ini membawa perempuan mengalami berbagai kerentanan kekerasan dan menumpulkan potensi perempuan untuk berpolitik. Karena hal ini maka dibutuhkan kerja-kerja pengorganisasian untuk membangkitkan semangat perempuan berpolitik, terutama pada level komunitas karena pada level inilah sebenarnya perempuan bisa belajar bernegosiasi dan berpolitik di luar politik formal parlemen.

Kata kunci: politik perempuan, partisipasi, komunitas.

---

Elisabeth Anita Dhewy Haryono. Redaksi Jurnal Perempuan. Jl. Lontar No. 12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12960. Telp: 021-83702005, Faks: 021-83706747

## **Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014?**

### **How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?**

Jurnal Perempuan, Vol. 19 No. 2, Mei 2014, hal. 153-160., 1 gambar, 2 tabel, 4 daftar pustaka

The decreasing number of votes for female legislative candidates for DPR RI in 2014 General Election aroused an urgent question related to the commitment of political parties to encourage female representatives in the parliament. The 2014 Election result showed that, so far, political parties only adopted the affirmative policy in the level of legal-formal. Practically, even though they had implemented the minimum quota of female representation in the candidacy, this policy was not followed up by the internal policy in the political party to earnestly support the quota for female representation. Therefore, the internal political party transformation was needed and was urgent to be done, both for its structural and cultural level.

Keywords: Female parliament, candidate, 2014 general election

Menurunnya jumlah kandidat legislatif perempuan di DPR RI 2014 pada Pemilu membutuhkan perhatian dan komitmen dari partai politik agar meningkatkan keterwakilannya. Pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai politik hanya mengadopsi kebijakan afirmatif pada level formal-legal. Secara praktik meskipun mereka telah menetapkan kuota minimal perempuan, tetapi tidak diikuti oleh kebijakan internal di dalam struktur partai politik yang mendukung kepemimpinan perempuan. Dus, transformasi kebijakan dalam internal partai politik dibutuhkan untuk perubahan budaya dan struktural yang lebih ramah gender.

Kata kunci: perempuan parlemen, caleg, Pemilu 2014

# Keuntungan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender

## *Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy*

**Shelly Adelina & Ani Soetjipto**

Program Studi Kajian Gender, Universitas Indonesia  
Gedung Rektorat UI, Lantai IV, Kampus UI Salemba, Jl. Salemba Raya no. 4 Jakarta 10430, telp: 021-3160788,  
021-3907407, faks. 021-3907407

[shelly.adelina@gmail.com](mailto:shelly.adelina@gmail.com) & [ani\\_soetjipto@yahoo.com](mailto:ani_soetjipto@yahoo.com)

Naskah Diterima 29 Januari 2014. Direvisi 24 Februari 2014. Disetujui: 12 April 2014

### Abstract

Analysis of the gender strategy in the three largest political parties which dominate the legislative period 2009-2014, namely the Democratic Party, the Golkar Party and the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) shows several findings that can be reflected to travel to face election. First, third parties accounted for the most number of women seats in the national parliament. Second, as the dominant parties through the fractions in the legislature, three showed no provisions regarding how the policies and strategies of political parties in efforts to achieve gender equality and gender mainstreaming strategies not found in political parties. Third, strategies that are present in the party institutions only tangible Department of Women as women focal point. Beyond that, the strategy of increasing the representation of women is based on justice, equality, and gender equity was absent.

Keywords: gender mainstreaming strategy, politics interest, political parties, representation of women.

### Abstrak

Analisis tentang strategi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi Pemilu. Pertama, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. Kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender, dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik. Ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. Di luar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen.

Kata kunci: kepentingan politik, strategi pengarusutamaan gender, partai politik, representasi perempuan.

## Pendahuluan

Ketika Lovenduski (2005) mengatakan dalam kalimat sinis bahwa parlemen merupakan gudang maskulinitas tradisional politik, dia menekankan pula betapa kondisi itu sangat berkorelasi dengan kondisi partai-partai politik sebagai 'distributor' utamanya. Dengan mudah dan terang benderang kita bisa memahami maksud Lovenduski. Selama partai politik tidak pernah beres melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, promosi, dan kepengurusan untuk dapat 'mendistribusikan' anggotanya ke Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya politikus perempuan yang mumpuni, maka selama itu pula parlemen akan terus berparas maskulin sebagaimana paras partai politik. Kontestasi politik internal partai-partai besar (Demokrat, Golkar, dan

PDIP) telah membuat calon legislatif perempuan cenderung kurang mendapat dukungan padahal dari situlah banyak kursi yang dimenangkan. Jika kita mencermati representasi anggota legislatif perempuan yang diwakili Demokrat, Golkar, dan PDIP pada tabel di bawah ini, maka akan terlihat bahwa tidak satu pun dari ketiganya mampu mencapai kuota 30 persen wakil perempuan di legislatif baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Permasalahan mengakar ada pada internal partai politik yang seharusnya menjadi hulu dari segala tindakan afirmatif ternyata belum mampu dan belum berkomitmen kuat untuk melibatkan perempuan sebagai sosok yang strategis dan menguntungkan mereka. Ketika proses rekrutmen, kaderisasi, peningkatan kapasitas, dan promosi di dalam partai

tidak dilaksanakan secara maksimal, hal tersebut menandakan belum adanya sikap ‘saling menghargai dan saling bergantung’ antara partai politik dengan anggota perempuannya. Perlu dipertanyakan, bagaimana partai politik menjadikan anggota perempuannya memiliki keterampilan berpolitik yang khas untuk sensitif dan peduli pada kebijakan-kebijakan yang responsif gender.

**Tabel 1**  
**Persentase Wakil Perempuan Tiga Parpol Pemenang Pemilu 2009 dalam Lembaga Legislatif Tiap Tingkatan**

Partai	DPR RI	DPD Provinsi	DPD Kabupaten/Kota
Demokrat	24 %	22 %	15 %
Golkar	18 %	17 %	15 %
PDI-P	18 %	17 %	13 %

Sumber : Puskapol FISIP UI (2010)

Di tengah kuantitas yang masih juga belum terpenuhi atas kuota minimal yang telah disepakati banyak negara dalam *Beijing Platform for Action on Equality, Development, and Peace* (1995) di mana Indonesia ikut menandatangani, kita tetap berharap kehadiran anggota legislatif perempuan di parlemen mampu memengaruhi terbentuknya berbagai kebijakan yang dapat membawa perubahan positif bagi penanganan isu-isu gender yang belum terselesaikan dengan baik di negeri ini. Mulai dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), buruh migran perempuan yang rentan menjadi korban kekerasan seksual, perdagangan perempuan dan anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kerusakan lingkungan, dan tingkat pendidikan tidak merata yang menyebabkan pemiskinan sistemik terhadap perempuan. Sebagai tiga kekuatan besar yang memainkan pengaruh penting dalam berbagai pengambilan dan penetapan kebijakan publik, maka menarik untuk mengetahui secara utuh dan mendalam tentang mekanisme dan proses—baik formal dan informal—dalam hal rekrutmen, promosi, serta prosedur, dan kepengurusan di dalam Partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Perlu diketahui pula bagaimana ideologi, kesungguhan politik (*political will*), komitmen, pemaknaan *affirmative action*, dan upaya mereka melakukan strategi pengarusutamaan gender di dalam tubuh partai.

Langkah ke depan akan semakin sulit jika politik kekuasaan di Indonesia mengarah pada

kecenderungan dominasi partai-partai besar saja. Dominasi bisa menyebabkan akses dan kontrol partai-partai menengah dan masyarakat sipil mengalami hambatan, ditambah dengan kondisi PUG di dalamnya tidak mencerminkan situasi dan kondisi sebagaimana harusnya, maka akan kian sulitlah gerakan perempuan merealisasikan perubahan kebijakan baru guna penanganan isu-isu perempuan. Penting untuk bisa menguak dan memaparkan lebih dalam tentang bagaimana aturan formal dan informal Partai Demokrat, Golkar dan PDI-P dalam memosisikan dan memberi peluang meraih kekuasaan kepada perempuan. Selain itu, bagaimana para pemimpin ketiga partai politik tersebut memaknai representasi perempuan, bagaimana konsep tindakan afirmatif dan pengarusutamaan gender (PUG) di dalam parpol? Juga sangat perlu untuk mengetahui bagaimana para perempuan anggota partai politik di ketiga partai pemenang Pemilu 2009 tersebut direpresentasikan di dalam partainya, serta bagaimana kepentingan perempuan itu sendiri dalam berpolitik. Dan bagaimanakah ideologi, kesungguhan politik, AD/ART, mekanisme rekrutmen, proses kaderisasi dan promosi, berikut kepengurusan yang ditetapkan di dalam Partai Demokrat, Golkar, dan PDI-P? Tabel 1.2 di bawah ini memaparkan jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif periode 2009-2014 di mana pada DPR RI jumlah wakil perempuan hanya mencapai 102 orang atau 18 persen dari total seluruh anggota 560 orang. Di DPRD tingkat provinsi yang keseluruhannya berjumlah 33 DPRD hanya ada 321 wakil perempuan atau 27,27 persen dari total 2005 anggota. Di DPRD kabupaten/kota yang keseluruhannya berjumlah 461 DPRD hanya terpilih wakil perempuan 1857 orang atau 12 persen dari total 15.757 anggota.

**Tabel 1**  
**Perempuan dalam Legislatif 2009-2014**

Lembaga	Perempuan		Laki-Laki		Total
DPR- RI	102	18 %	457	82 %	560
DPRD Provinsi (33)	321	27,27 %	1684	84 %	2005
DPRD Kab/Kota (461)	1857	12 %	13901	88 %	15757

Sumber : Komisi Pemilihan Umum

Sulit terbantahkan bahwa partai-partai politik merupakan lembaga yang paling memengaruhi cara pengaturan praktik representasi politik. Partai-partai politik besar mempunyai kemampuan untuk

memelihara tradisi dan budaya politik, menghalangi atau memperlambat perubahan, sekaligus melindungi para elitnya. Lovenduski (2005) mengingatkan bahwa argumen yang biasa digunakan partai politik untuk menghalangi kiprah perempuan di dalam partai dan di ruang publik adalah soal perbedaan peran domestik dan publik. Bagi beberapa kalangan, argumen ini sangat mengena jika dikaitkan dengan kewajiban perempuan mengurus keluarga (ranah domestik), dan suami ditetapkan sebagai kepala keluarga untuk bertanggung-jawab di ranah publik. Dengan pembakuan peran tersebut maka terjadilah marginalisasi terhadap anggota perempuan di dalam parpol dengan cara meletakkan mereka lebih banyak pada divisi yang fokus mengurus hal-hal 'keperempuanan' belaka. Kondisi tersebut membuat perempuan menjadi lebih sulit bersaing dan berkompetisi jika mereka ingin memperoleh kedudukan atau posisi penting dan strategis di partai mereka.

### **Kepentingan Politik Perempuan dalam Konsep Perwakilan Perempuan**

Isu-isu gender seperti perdagangan perempuan dan anak (*trafficking*), tingginya Angka Kematian Ibu saat melahirkan, pelayanan kesehatan yang kurang memadai, semakin banyak perempuan yang terjebak dalam prostitusi, serta mereka yang terpaksa memilih menjadi buruh migran akibat pemiskinan, kesemuanya menjadi keprihatinan para feminis. Mengapa demokratisasi yang seharusnya meningkatkan martabat dan hak dasar setiap manusia, termasuk hak kebebasan dan pencapaian ekonomi, malah berdampak negatif bagi mayoritas perempuan dan membuat kehidupan mereka menjadi lebih buruk? Para feminis akademisi menaruh curiga pada klaim-klaim mengenai konsep netralitas, objektivitas, inklusivitas yang selalu menjadi jargon dan arus utama teori politik dan ilmu sosial klasik yang masih bersifat androsentris baik dalam teori, metodologi, maupun temuan riset. Androsentrisme adalah asumsi, konsep, keyakinan, argumen, teori, metodologi, hukum, kebijakan, dan institusi yang kesemuanya berdimensi gender. Artinya, secara eksplisit maupun implisit hanya menguntungkan salah satu jenis kelamin dan lebih menguntungkan jenis kelamin lainnya, yaitu jenis kelamin laki-laki. Hidup dan pengalaman laki-laki selalu menjadi standar tentang apa yang dianggap normal bagi perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat tertentu. Pola hidup dan pola pikir laki-laki menjadi

yang utama, perempuan adalah pelengkap.

Begitu pula yang terjadi dalam kehidupan sosial, di organisasi dan institusi politik, kondisi androsentris terkait asumsi, konsep, keyakinan, argumen, dan kebijakan-kebijakan yang kerap "buta gender" dan netral gender. Kebijakan "buta gender" adalah kebijakan yang terlihat netral dan universal namun isinya mencerminkan bias kepentingan kelompok yang mendominasi di lembaga pengambil kebijakan publik. Kebijakan dirumuskan secara sadar atau tidak sadar berdasarkan cara pandang/perspektif dari kelompok yang dominan tersebut, realitasnya kelompok yang dominan itu bersosok maskulin. Ada banyak faktor-faktor yang tidak diperhitungkan yang membuat perempuan lebih sulit memperoleh hasil dan manfaat yang sama dari partisipasi politik mereka meski telah mengikuti prosedur yang sama dengan laki-laki. Dengan latar belakang pemikiran tersebut, kajian ini mencoba memotret bagaimana keadilan gender dimaknai dan diperhitungkan di arena politik formal melalui institusi partai politik. Ada kecurigaan bahwa Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai sebuah strategi belum bisa efektif diperjuangkan pada 3 partai terbesar pemenang Pemilu 2009 (Demokrat, Golkar, dan PDI-P), atau digarisbawahi lagi bahwa strategi PUG macet dan tidak bisa berjalan di parpol dengan berbagai alasan, sehingga kita harus mencari upaya lain untuk memperbaiki representasi politik perempuan.

Ada tiga strategi untuk mencapai keadilan gender di arena politik menurut Squires (2007), yaitu strategi melalui kuota, PUG, dan pembentukan fokus utama gender (*gender focal point*) yang dalam hal ini dimaknai sebagai fokus utama terhadap perempuan (*women focal point*) di berbagai institusi pengambilan keputusan. Jika kuota perempuan menasar pada jumlah (kehadiran), maka PUG mengarah pada tujuan untuk memastikan proses yang berjalan di arena pengambilan keputusan untuk mengintegrasikan prinsip keadilan gender. Melalui strategi PUG ada pengukuran yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Oleh karena itu, PUG sesungguhnya bertujuan memfasilitasi partisipasi yang bersifat substantif di arena pengambilan keputusan/kebijakan publik. PUG berfokus pada gender, bukan kepada perempuan secara nominal. Dengan demikian, tidak menafikan pentingnya pengalaman, kerja sama, dan perspektif laki-laki dalam membawa kebijakan yang adil gender. Jika kuota berfokus pada distribusi kuasa yang bersifat vertikal di partai dan parlemen, maka PUG menasar dan berfokus

pada tataran horizontal di departemen dan institusi politik, termasuk di partai, parlemen, serta birokrasi pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Fokus terhadap perempuan (*women focal point*), seperti juga PUG, melihat visi politik secara komprehensif dalam tataran formal dan informal, demokrasi langsung-demokrasi representatif, mengarah pada kepentingan praktis gender dan strategis gender. Kuota, sebaliknya, melihat visi politik secara terbatas dalam politik yang lebih formal, antara lain dalam partai dan parlemen. Ketiga strategi ini sebetulnya saling melengkapi dan komprehensif di tataran idealnya, dengan tujuan agar gerakan perempuan mampu mengelola hubungan baik dengan negara. Namun dalam kenyataannya, ada persoalan praktis yang membatasi implementasi efektif dari kebijakan itu.

Kritik utama terhadap kuota adalah potensinya untuk menjadi esensial, hanya mengejar jumlah (kuantitas) dan meminggirkan kualitas representasi serta perspektif gender. Adapun PUG berpotensi kembali meminggirkan perempuan karena mengizinkan siapa pun untuk ikut serta (*integrationist*), bersifat birokratik-teknokratik dan semakin memperkuat prinsip neoliberal yang kian menjauh dari gagasan keadilan gender. Di sisi lain, fokus terhadap perempuan yang menggunakan asas keterwakilan perempuan berpotensi mengarah pada esensialisme, padahal kategori perempuan bukanlah kategori yang homogen. Kuota, PUG, dan fokus terhadap perempuan merupakan konsep dan teori yang dilahirkan oleh kalangan feminis yang mengasumsikan adanya ideologi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menarik untuk kita ketahui apa dan bagaimana sebetulnya kepentingan politik perempuan serta bagaimana kepentingan yang ada itu idealnya menjadi ideologi yang diperjuangkan partai politik. Molyneux (2004) mengatakan bahwa kriteria-kriteria yang umum digunakan untuk mengukur bagaimana kepentingan kelompok sosial bisa diperjuangkan dalam konteks politik di negara kapitalis atau sosialis yang patriarkis sangat sering bermasalah dan tidak sesuai jika digunakan untuk mengukur kepentingan perempuan. Teori-teori feminis yang berkembang memperlihatkan tidak adanya penjelasan tunggal penyebab subordinasi perempuan yang bisa dijadikan landasan utama untuk mendefinisikan kepentingan perempuan.

Molyneux juga menyebutkan tiga konsep yang dianggap sebagai kepentingan perempuan yaitu : 1) kepentingan perempuan (*women interest*); 2)

kepentingan gender praktis (*practical gender interest*); dan 3) kepentingan gender strategis (*strategic gender interest*). Kategori kepentingan perempuan (*women interest*) menjadi konsep yang sangat problematik mengingat identitas perempuan adalah identitas yang heterogen, hadir bersinggungan dengan identitas lain seperti kelas sosial, kelas ekonomi, etnis, suku, juga tingkat pendidikan, sehingga hampir tidak mungkin menggeneralisasi adanya satu kepentingan perempuan yang sama di berbagai tempat. Oleh karena itu yang diperlukan adalah membuat spesifikasi tentang kategori perempuan itu sendiri yang mungkin akan bertindak dan dipengaruhi secara berbeda oleh karena posisi sosial mereka, serta melalui identitas perempuan yang disandangnya. Untuk itu perlu menyebutnya sebagai *gender interest* guna menghapus ilusi adanya kepentingan perempuan yang dianggap homogen. *Gender interest* adalah kepentingan perempuan (juga laki-laki) yang diperoleh karena adanya posisi sosial atau konstruksi sosial melalui atribut gender yang disandangnya. Kepentingan gender bisa bersifat praktis dan strategis. *Strategic gender interest* adalah analisis yang berasal dari subordinasi perempuan dan formulasi dari tujuan/keinginan/mimpi untuk membuat pengaturan baru dari pengaturan dan struktur yang ada saat ini. *Strategic gender interest* diformulasikan secara deduktif melalui kriteria etis dan teoritis yang bertujuan untuk mengakhiri subordinasi perempuan, antara lain menghapus pembagian kerja seksual; meringankan beban ganda kerja domestik dan publik; menghapus institusi yang melanggengkan diskriminasi dan menggantinya atau mereformasinya menjadi bentuk baru; memperjuangkan kesetaraan dan keadilan politik; dan menghapus kekerasan terhadap perempuan. Untuk bisa membawa dan memperjuangkan *strategic gender interest* membutuhkan kesadaran sebagai seorang feminis.

Pada sisi lain *practical gender interest* beranjak dari kondisi objektif yang konkret dalam kerangka pembagian kerja gender berdasarkan posisi sosial perempuan. *Practical gender interest* tidak selalu memerlukan kesadaran feminis tetapi dapat langsung diformulasikan sendiri oleh perempuan berdasarkan posisi mereka dalam struktur sosial, alias bukan karena hasil intervensi dari luar. *Practical gender interest* biasanya mengarah pada kebutuhan jangka pendek, yaitu kebutuhan langsung dan tidak langsung yang selalu bertujuan mengubah ketimpangan relasi kuasa. Contohnya, kebutuhan ekonomi dasar akan

bahan makanan, air, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan. Politisasi *practical gender interest* dan transformasinya untuk menjadi *strategic gender interest* yang disertai kesadaran sehingga perempuan bisa mengidentifikasi dan mendukungnya adalah perjuangan dan praktik politik yang dicita-citakan feminis politik. Dengan membawa konsep ini dalam studi tentang perempuan di partai politik, maka kita bisa melihat bahwa perempuan yang terlibat di dalam partai politik sesungguhnya punya beragam kepentingan ketika mereka memutuskan untuk berpartisipasi di arena politik. Menarik untuk mencermati bagaimana aktivis perempuan di dalam partai memaknai kepentingan gender dan memperjuangkannya dalam pertarungan internal di partai mereka. Dengan kata lain, ideologi perempuan seperti apa yang selama ini menjadi arus utama di partai politik dan dengan basis pemaknaan tersebut bagaimana aktivis perempuan berkontestasi, berkompromi, dan bernegosiasi di partai mereka? Lalu kepentingan apa atau kepentingan gender apa yang bertahan dan kepentingan apa yang dikorbankan?

Saat menganalisis kepentingan gender, kita tidak bisa lepas dari soal kepentingan manusia (*human interest*) yang ada antara laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana konsep *human interest* ini bisa dikonseptualisasikan? Young (1990) melihat bahwa kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki dari sudut pandang perbedaan biologis (*sexual difference*) mereka. Perbedaan biologis menyebabkan perbedaan kepentingan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini mendapat kritik luas yang melihat perempuan hanya dalam kategori tunggal jenis kelamin yang homogen. Phillips (1991) melihat adanya kepentingan perempuan yang sangat kontekstual, beragam, tidak sama di tiap tempat dan bersifat "cair" karena kategori perempuan sesungguhnya bukan kategori homogen. Phillips mengakui adanya perbedaan kepentingan perempuan yang berbeda dari laki-laki, namun dunia politik yang menjadi lebih penting adalah membuat partisipasi secara adil (*equalizing participation*) dengan melupakan sejenak perbedaan gender. Phillips tentu tidak lepas dari kritik yang mengatakan bahwa mengedepankan *equalizing participation* dengan mengejar jumlah sering meminggirkan hadirnya perspektif dan ideologi gender di arena politik formal. Mouffee dalam Randal (1991) keluar dari perdebatan kepentingan biologis jenis kelamin (*sexual biological interest*) dan *gender interest* dengan menganggap

arena politik sebagai arena kontestasi terbuka. Perempuan memiliki kepentingan yang bersifat praktis dan strategis. Lepas dari perbedaan gender, jenis kelamin, identitas, kepentingan perempuan, dan kepentingan gender, kita seharusnya bisa keluar dari debat terminologi untuk tujuan demokrasi yang lebih substantif. Kaitan antara identitas dan politik representasi dengan demikian sangat kompleks dan tidak bisa disederhanakan dengan asumsi identitas bersama (*shared identity*). Perempuan bisa jadi bersifat sangat rasional dalam pertarungan perebutan kepentingan dan menjadi tidak terlihat (*invisible*), tetapi bukan berarti identitas tradisional kurang dihargai dibandingkan identitas gender yang lebih strategis karena terdapat kesempatan dan konteks politik.

### Metodologi Feminis

Dengan menetapkan pilihan atas metodologi berperspektif gender maka jelaslah bahwa paradigma yang menjadi landasan penelitian ini adalah paradigma kritikal kualitatif yang klaimnya berupaya mencari temuan-temuan dalam konteks sosial, budaya, waktu, dan penelusuran yang spesifik (*a Truth*), berbeda dengan penelitian berlandaskan paradigma positivistik kuantitatif yang mencari temuan-temuan berlaku umum dalam segala konteks (*the Truth*). Tujuan penelitian kritikal secara umum adalah mengungkap fakta di balik fenomena, mengungkap mitos dan ilusi, serta menekankan terbukanya keyakinan dan ide-ide baru. Subjektivitas dalam penelitian ini berperspektif perempuan, yaitu keberpihakan terhadap perempuan dan permasalahannya. Sadli dan Porter (1999) menegaskan bahwa karena pendekatan penelitian berperspektif perempuan adalah keberpihakan pada perempuan, maka perspektif subjek penelitian tentang pengalaman perempuan menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Perspektif perempuan merupakan pendekatan yang dikembangkan untuk memahami pengalaman perempuan karena perspektif konvensional dianggap bias ideologi laki-laki. Prinsip dalam perspektif perempuan adalah: 1) menganggap gender sebagai faktor yang berpengaruh menentukan persepsi dan kehidupan perempuan, membentuk kesadaran, keterampilan, dan membentuk pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan; 2) tujuan riset bukanlah mengutamakan perempuan secara nominal melainkan pengalaman perempuan; 3) riset berperspektif perempuan secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada perempuan dan

permasalahannya di tengah kehidupan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan budaya dengan metode riset yang tidak dibatasi secara ketat, serta kriteria pilihan ditentukan oleh apa yang dianggap penting untuk dapat memahami perempuan dan permasalahannya; 4) kesahihan riset berkaitan dengan pengalaman perempuan sebagai indikator realitas; 5) fokus perempuan adalah masalah perempuan yang dialami sebagai konsekuensi dari relasi gender, di mana perempuan dan permasalahannya dikaji dengan memilih cara yang dapat membuat perempuan dan permasalahannya terungkap secara kasat mata.

Keberpihakan pada perempuan politikus Indonesia dalam penelitian ini adalah keberpihakan kepada mereka yang terlibat aktif dalam partai politik masing-masing. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif umumnya menggunakan sampel purposif. Sampel tidak diambil secara acak tetapi justru dipilih mengikuti kriteria tertentu (Poerwandari, 2005). Maka dalam penelitian ini ditetapkan kriteria subjek penelitian: 1) pemimpin atau para pengambil kebijakan pada tiga partai pemenang Pemilu 2009 yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P; 2) perempuan aktivis partai politik (ketua Departemen Perempuan) dari tiga partai pemenang Pemilu 2009 (Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P). Menurut Strauss dan Corbin (1990), pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka, dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Berdasarkan keyakinan akan pendekatan penelitian ini maka data dikumpulkan menggunakan metode wawancara mendalam terhadap para penentu kebijakan di Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P. Melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), realitas di balik fenomena yang muncul dapat terkuak lebih gamblang. Hal tersebut tampak sangat nyata ketika mereka memaparkan konsep tindakan afirmatif yang mereka pahami selama ini dan implikasinya dalam menghadirkan bentuk kebijakan partai terkait kader perempuan mereka. Selain wawancara mendalam, metode pengumpulan data yang digunakan adalah *focus group discussion* (FGD), observasi, dan studi dokumen untuk mengetahui ideologi partai, AD/ART dan dasar-dasar peraturan internal, *platform*/sikap partai, program kerja, pedoman organisasi, juklak (petunjuk pelaksanaan) dan Keputusan DPP, serta struktur kepengurusan. FGD melibatkan akademisi/pengamat gender dan politik, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perempuan aktivis partai politik, jurnalis, dan wakil

dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP PA).

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali kesungguhan politik (*political will*), ideologi, komitmen, konsep PUG, mekanisme perekrutan, bentuk-bentuk kaderisasi, peningkatan kapasitas anggota, promosi, dan kriteria penentuan kepengurusan parpol. Setelah wawancara mendalam, dilakukan pengujian silang hasil wawancara pada pemimpin partai dengan pengalaman aktivis perempuan pada ketiga partai yang diteliti. Langkah ini diambil sesuai dengan teknik wawancara mendalam yang disampaikan Minichiello (1995). Analisis dilakukan setelah data diolah dan menemukan kategorisasi serta hubungan antar-kategori. Analisis bersifat induktif yaitu mencoba memahami situasi sesuai sebagaimana situasi menampakkan diri, dan menerapkan pemahaman yang utuh menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Dengan demikian analisis berorientasi pada eksplorasi, penemuan, dan logika memahami keadaan yang apa adanya (paradigma alamiah). Hal tersebut didasari kesadaran bahwa konteks sosial yang kompleks sering tidak dapat dimengerti hanya dalam potret statistik karena gejala sosial bukanlah hal yang statis. Dengan analisis induktif maka proses penelitian menjadi dinamis dan terbuka untuk terus disempurnakan. Data yang telah dianalisis atau diolah kemudian disajikan mengikuti cara yang dikemukakan Sarantakos (1993) dalam bentuk deskriptif, yaitu mendeskripsikan temuan disertai cuplikan wawancara dan pendapat peneliti berdasarkan konsep dan teori yang digunakan.

### **Partai Politik Masih 'Alergi' Dengan Gagasan Feminis**

Dari semua dokumen partai dan hasil wawancara mendalam terhadap semua subjek penelitian, tidak didapati adanya ketentuan menyangkut kebijakan dan strategi partai tentang upaya mewujudkan keadilan gender, juga tidak ditemukan strategi Pengarusutamaan Gender di dalam partai. Hasil analisis terhadap struktur internal partai—jika mengacu pada tiga strategi keadilan gender di arena politik sebagaimana dikemukakan Squires (2007), maka yang baru hadir dalam institusi partai adalah *women focal point* yang berwujud Departemen Perempuan. Namun di luar itu, strategi PUG maupun strategi peningkatan representasi yang berdasar atas keadilan, kesetaraan, dan equitas gender absen dan tidak didapati dalam tiga partai politik peraih kursi terbanyak di parlemen periode 2004-2009 (Demokrat,

Golkar, dan PDI-P). Fungsi Departemen Perempuan atau Badan Pemberdayaan Perempuan di dalam partai jika dilihat dari struktur yang ditunjukkan terlihat beragam di antara tiga partai tersebut. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Sayap Perempuan Partai tidak terintegrasi secara baik, terutama pada Partai Demokrat dan PDI-P, dan posisi mereka marginal dalam pengambilan keputusan penting di dalam partai. Departemen Perempuan hanya bisa mengusulkan, akan tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan ketua umum partai atau ketua Dewan Pembina Partai. Temuan menunjukkan bahwa Partai Golkar sebagai partai yang memiliki pengalaman panjang kepartaian dan terbentuk paling awal dibandingkan PDI-P dan Partai Demokrat, memiliki struktur internal yang relatif lebih rapi dan terintegrasi dengan baik. Ketua Departemen Perempuan Partai Golkar juga elit kunci dalam pengambilan keputusan penting di partai tersebut, sangat berbeda kondisinya dengan Ketua Departemen Perempuan pada Partai Demokrat. Namun begitu, masih perlu dipertanyakan bagaimana perspektif gender dan keberpihakan Ketua Departemen Perempuan partai Golkar meski yang bersangkutan berada dalam posisi elit partai. Efektivitas dari fokus utama terhadap perempuan dalam partai sebetulnya sangat tergantung bagaimana perspektif gender pimpinan departemen dan apakah dia memiliki strategi untuk bisa mewujudkan keadilan gender di dalam partainya.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemahaman perempuan yang duduk pada posisi pimpinan Departemen Perempuan tentang pemberdayaan perempuan dan PUG masih belum mencapai tahap pemahaman yang dalam dan menyentuh berbagai persoalan dari berbagai isu gender yang terus meruak di tengah masyarakat. Sama seperti pemahaman para pemimpin partai (laki-laki), keadilan dan kesetaraan gender masih dimaknai sebagai konsep kesempatan yang sama (*equal opportunity concept*), dan belum dipahami pentingnya juga kesempatan dan akses yang sama untuk menuju keadilan. Perlu dipahami bahwa memperlakukan semua orang sama, tidak berarti bahwa setiap orang mempunyai kesempatan dan akses yang sama. Pemahaman tentang pemberdayaan perempuan dan keadilan gender di dalam partai politik masih dalam tataran esensial yaitu melihat kategori perempuan dan laki-laki hanya dari jenis kelamin dan belum melihat pada kategori gender. Artinya, belum ada pemahaman bahwa ada relasi gender yang hadir

sebagai akibat dari konstruksi gender dan peran gender yang dilekatkan, serta identitas gender yang beragam antara laki-laki dan perempuan, sehingga sering terjadi masalah antara kedua jenis kelamin tersebut baik yang berifat praktis maupun strategis di berbagai aspek kehidupan.

Analisis terhadap Ketua Departemen Perempuan di tiga partai terkait bagaimana ideologi gender yang mereka bawa ke dalam partai ketika mereka memutuskan bergabung, juga kepentingan apa yang diperjuangkan oleh mereka setiap berpartisipasi dalam setiap aktivitas di partai politik, memperlihatkan bahwa pada akhirnya keberadaan mereka di dalam partai telah terpengaruhi kondisi kontestasi politik untuk hanya mengedepankan kepentingan partai mereka dan membantu sebagai pelaksana saja. Tidak satu pun subjek penelitian menyebutkan atau berani mengemukakan adanya kepentingan gender strategis atau kepentingan gender praktis yang secara spesifik ingin mereka perjuangkan di dalam partai masing-masing. Isu perempuan dan ekonomi, KDRT, perdagangan perempuan dan anak, perempuan buruh migran dan domestik, AKI, prostitusi dan HIV/AIDS, belum dianggap sebagai isu gender yang menjadi fokus dari *women interest* (kepentingan perempuan). Mereka masih menganggapnya sebagai isu umum sebagaimana pemikiran pimpinan laki-laki dalam partai yang juga menjadi subjek dalam penelitian ini.

Jika mencermati pemaparan para subjek penelitian dari ketiga partai besar dalam penelitian ini, terdapat pemetaan model rekrutmen dan kaderisasi yang formal, terutama pada Golkar dan PDI-P yang diterapkan untuk memprediksi masa mendatang. Namun, selain aturan formal, terdapat logika dan aturan informal yang juga berjalan sehingga kesepakatan formal tetap selalu bisa dilanggar oleh pimpinan partai. Jika pimpinan partai boleh melanggar maka tidak ada satu pun instrumen atau mekanisme bisa mengaturnya. Dengan demikian tampak jelas logika maskulin sangat berperan dalam sistem kepartaian kita. Tabel berikut ini menunjukkan model rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDI-P.

**Tabel 3**

**Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP**

No	PARTAI	REKRUTMEN	KADERISASI
1	Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada aturan internal</li> <li>- Massal dan menunggu (pasif)</li> <li>- Mengandalkan Sayap Perempuan</li> <li>- Mengandalkan kreativitas individu dalam partai (mendekati komunitas lama, lingkungan sekitar, memfasilitasi kelengkapan administrasi calon kader)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sayap Perempuan bekerja sama dengan lembaga lain di luar partai untuk pelatihan peningkatan kapasitas</li> <li>- Berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten</li> <li>- Bergilir dan berjenjang</li> <li>- Training internal: kapasitas pengurus untuk promosi legislatif di berbagai level (3 level: DP, DPD, DPC)</li> <li>- Kaderisasi di tingkat kecamatan: peningkatan kemampuan mendapatkan pemilih</li> <li>- DPC: keterampilan berhadapan dengan berbagai organisasi (teknik pendekatan dan negosiasi)</li> <li>- DPD : melahirkan ide (gagasan), berpikir strategis</li> </ul>
2.	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensif sesuai jenjang</li> <li>- Kader Penggerak Teritorial Desa (Karakterdes): ujung tombak</li> <li>- Menarget 75-150 kader desa</li> <li>- Masing-masing desa mempunyai dua orang Karakterdes (d disesuaikan dengan jumlah TPS)</li> <li>- Orang baru (bukan kader) : jatah 10 % (tokoh masyarakat, tokoh profesional, purnawirawan, aktivis, dll)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Karakterdes: keterampilan menarik anggota baru</li> <li>- Kader Penggerak Partai: keterampilan menjadi pengurus/calon pengurus pada bidang manajemen organisasi, manajemen politik, teknik berkomunikasi</li> <li>- Kader Fungsional (kader pada lini-lini profesi)</li> <li>- Kader Pemerintahan: peningkatan wawasan tentang perjuangan partai, kebijakan pembangunan</li> <li>- Kaderisasi dilakukan berjenjang: kabupaten, provinsi, nasional.</li> <li>- Kader yang terlatih kemudian dijadikan Fungsionaris partai: menjalankan fungsi-fungsi kepartaian sesuai level: melakukan intensifikasi dan sosialisasi ke masyarakat, mendorong kaderisasi di level daerah, advokasi, memfasilitasi bergeraknya partai di tingkat bawah.</li> <li>- Peningkatan kapasitas anggota muda dan kader perempuan (AMPI dan KPPG)</li> </ul>
	PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui Cabang Pelopor (DPD: 33 provinsi, DPC : 493 kabupaten/kota, PAC: 18.000-ranting desa dan anak ranting dusun)</li> <li>- Kader perempuan: menggerakkan lebih dulu kader-kader perempuan yang dekat dengan struktur partai atau yang ada di legislatif dan eksekutif, juga di lingkungan masyarakat sekitar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menempatkan 65 cabang melaksanakan Trias Dinamika Partai (petugas struktur di partai, legislatif, eksekutif) dengan melibatkan masyarakat sampai level bawah</li> <li>- Membangun kemampuan kader di desa untuk mengawal dan menyelesaikan masalah masyarakat dengan kebijakan partai menuju ke kebijakan pemerintah daerah melalui Musrenbang di tiap level</li> <li>- Menetapkan 65 cabang melaksanakan Trias Dinamika Partai.</li> </ul>

Sumber: Hasil wawancara peneliti (2011)

Selanjutnya tabel di bawah ini menunjukkan proses pencalonan dan promosi caleg perempuan yang dilakukan Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDI-P.

**Tabel 4**

**Pencalonan dan Promosi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP**

No.	PARTAI	PENCALONAN & PROMOSI	
		Legialtif	Pilkada
1.	Demokrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung kader internal</li> <li>- Ada Departemen Pemenangan Pemilu</li> <li>- Mengandalkan Sayap-Sayap, termasuk Sayap Perempuan</li> <li>- Seleksi administratif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendukung kader internal</li> <li>- Kombinasi (dengan alternatif)</li> <li>- Gubernur oleh Dewan Pembina ; Bupati oleh DPP</li> <li>- Survei (untuk DPP)</li> </ul>

2.	Golkar	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekomendasi KPPG (memerhatikan elektabilitas &amp; popularitas, komposisi yang ada, perbandingan wakil-wakil kelompok terkait latar belakang suatu dapil)</li> <li>- Didahului survei (dilakukan setelah 2010)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Didahului survei</li> <li>- Pendekatan untuk bekerja sama dengan orang dari luar partai yang hasil surveinya tinggi, ada angka toleransi</li> </ul>
3.	PDIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Didahului survei</li> <li>- 30 % untuk perempuan bergantung pada level</li> <li>- DPP mendapat masukan dari daerah, diklasifikasi di tingkat nasional</li> <li>- Mengandalkan Sayap Merah Putih</li> <li>- Mengandalkan Cabang Pelopor di 71 kabupaten/kota</li> <li>- Partai menerbitkan rekomendasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Di dahului survei independen, dilakukan DPP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat</li> <li>- Dukungan gotong royong</li> <li>- Mengandalkan Cabang Pelopor</li> <li>- Kader dipantau lewat DPP di daerah</li> </ul>

Sumber: Hasil wawancara peneliti (2011).

Partai politik sebagai institusi demokrasi sejauh ini memandang fungsi menggalang pemilih sebagai peran terpenting yang dimainkan dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangkan kontes pemilu. Demokrasi telah dimaknai oleh partai politik sebagai liberalis, realis, representatif, institusionalis, dan integrasionis. Dalam kerangka seperti ini partai menganggap bahwa perempuan dan sayap perempuan harus bisa dijadikan alat mendongkrak pengaruh untuk mendapatkan suara. Seiring dengan konsolidasi demokrasi, partai kembali ke karakter asli yang ditandai dengan pola patron-klien, non-ideologis, tidak disiplin, serta penuh dengan kepentingan praktis dan akomodatif. Dalam konteks partai yang seperti ini, tampaklah bahwa partai-partai politik masih jauh dari sikap mampu menerima gagasan feminis, atau masih “alergi” pada feminisme. Ketika partisipasi dan representasi perempuan dipenuhi hanya untuk memenuhi persyaratan undang-undang, dan dengan tetap mempertahankan karakternya, lebih tepat jika kita katakan partai hanya berupaya menjinakkan kepentingan gender dan kepentingan perempuan untuk mempreteli elemen transformasi yang seharusnya menyertainya. Partai politik berusaha mengagregasikan kepentingan publik, mengintegrasikan sikap politiknya yang bercorak pemersatu, sebagai alat untuk merangsang atau mengedepankan daya tarik dari berbagai spektrum pemilih dan menghapus isu yang dianggap tidak bisa dijadikan konsensus atau mengganggu untuk pencapaian penggalangan pemilih.

Jikapun ada tekanan agar isu keadilan gender terakomodasi di dalam partai politik, hal tersebut dijawab dengan bentuk akomodasi dari elit partai hanya pada kandidat perempuan yang bisa “dijinakkan” namun juga setiap saat bisa mencoret kandidat perempuan yang tidak bersikap sama

dengan mereka. Ketika tuntutan dimunculkan untuk mengedepankan politik beretika, partai politik serta merta merespons bahwa politik bukan arena perjuangan untuk kemurnian etika. Tugas partai politik adalah mengembangkan strategi swadaya (*self-help*) untuk mewujudkan kemandirian setiap orang dan memfasilitasi sehingga dia bisa menolong dirinya sendiri, bukan dalam bentuk distribusi keadilan sosial. Situasi ini memunculkan kondisi di internal partai politik yang memang tidak memiliki proses membatasi dan menyeimbangkan (*check and balances*). Partai politik menggunakan aturan yang buta dan netral gender dalam praktik politik pengambilan keputusan dengan tidak membedakan dan menyamakan semua kriteria kaderisasi, promosi, dan nominasi antara kader perempuan dan laki-laki. Strategi kuota internal di partai politik pun tidak terdapat di semua partai yang dikaji dalam penelitian ini. Para pemimpin partai, khususnya para subjek penelitian ini, menganggap kuota bagi perempuan justru melanggar prinsip demokrasi dan mendiskriminasi laki-laki. Perempuan direpresentasikan oleh partai politik sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan partai dan kepentingan umum, tanpa beban khusus untuk memperjuangkan isu-isu perempuan. Dengan demikian keberadaan perempuan dan kepentingan perempuan di dalam partai dianggap sama seperti keberadaan laki-laki dan kepentingan laki-laki di dalam partai.

Dengan pandangan umum seperti itu, gagasan untuk mencantumkan kuota gender dalam AD/ART partai menjadi tidak relevan bagi para elit partai penentu kebijakan. Menurut mereka, aturan AD/ART, juklak dan juknis, tidak boleh mendiskriminasi laki-laki maupun perempuan dan harus dibuat bersifat umum. Jelaslah bahwa pemahaman tentang

kuota sebagai salah satu bentuk dari tindakan afirmasi pun masih memprihatinkan di kalangan partai politik. Padahal para feminis berkeyakinan bahwa kuota perlu diambil untuk mempercepat persamaan kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan. Tidak banyak orang yang benar-benar menyadari fakta bahwa kebanyakan perempuan masih terjerembab dalam pemiskinan, peminggiran, perendahan, dan tidak terpenuhinya hak-hak mereka sebagai manusia berjenis kelamin perempuan. Sementara itu nilai-nilai sosial budaya dan watak patriarkis negara belum sungguh-sungguh tulus dalam berbagai perundangan yang dibuat, karena realitasnya masih menghambat dan menutup kesempatan bagi perempuan untuk bisa hadir di lembaga pengambilan kebijakan. Pengertian awal tindakan afirmatif adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan pemberian kompensasi dan keistimewaan bagi kelompok minoritas guna mencapai representasi yang lebih proposional dan beragam dalam suatu institusi. Yang belum disadari para elit partai politik dalam konteks ini adalah bahwa tindakan afirmatif merupakan “diskriminasi bersifat positif” yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan dalam perspektif gender. Kebijakan ini diperlukan untuk memfasilitasi adanya “titik awal” yang sama bagi perempuan, laki-laki, dan juga golongan minoritas dan tertindas lainnya. Oleh sebab terdapat golongan yang memiliki keistimewaan lebih karena mereka mayoritas, maka diperlukanlah tindakan khusus (tindakan afirmatif) yang memihak dan bersifat sementara kepada para minoritas. Sebuah sarana terpenting untuk menerapkannya adalah melalui hukum, yang berarti jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konsitusi dan undang-undang.

Undang-Undang No.7 tahun 1984 yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW*) pada pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa pengambilan oleh para negara peserta tindakan-tindakan khusus sementara yang ditujukan pada peningkatan persamaan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak akan dianggap sebagai diskriminasi seperti yang didefinisikan dalam konvensi ini, tetapi dalam cara apapun tidak dianggap sebagai konsekuensi dipertahankannya standar yang tidak sama atau terpisah; tindakan-tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuan-tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah

tercapai. Pada tahun 2000, dalam amandemen II UUD 1945, ketentuan tentang tindakan afirmatif diatur dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28 H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal ini didasarkan atas kesadaran bahwa satu peraturan yang netral, yang diberlakukan sama kepada seluruh kelompok masyarakat yang berbeda keadaannya, akan menimbulkan kesempatan dan manfaat yang berbeda yang berdampak lahirnya ketidakadilan. Maka negara berkewajiban membuat peraturan khusus bagi mereka yang karena kondisi dan rintangannya tidak dapat menerima manfaat dari ketentuan yang bersifat netral tadi. Tindakan ini disandarkan pada fungsi hukum sebagai sarana untuk mencerminkan ketertiban dan keadilan serta melakukan rekayasa sosial untuk mengubah perilaku masyarakat. Penting bagi semua pihak untuk memahami alasan perlunya kuota minimal 30 persen untuk perempuan dengan dasar argumentasi yang jelas, kritis, berstruktur dan berbasiskan pengalaman perempuan. Dari substansi ini, bisa disusun strategi, agenda dan kerja politik perempuan yang dibangun dengan kritis pula.

Selain aturan kuota yang tampaknya “terpaksa” dilaksanakan partai politik, sekali lagi perlu ditegaskan bahwa mekanisme informal dalam pengambilan keputusan partai sering terjadi di samping aturan formal yang berjalan. Ketua umum partai politik sangat berwenang mengubah keputusan demi alasan khusus yang dianggap berpotensi membawa citra buruk bagi partai. Fungsi elektoral partai yang menjadi fokus kerja partai saat ini hanya menekankan elektabilitas yang meminggirkan semua proses demokrasi internal di dalam partai sehingga mekanisme pemeriksaan dan pengembangan harus dilakukan secara berkala. Salah satunya adalah menggunakan strategi PUG. Sebagai gagasan, PUG seharusnya bisa dijadikan alat untuk mendemokratisasi partai politik. PUG selama ini hanya dipertimbangkan sebagai beban Departemen Pemberdayaan Perempuan yang ada di dalam partai politik. Terlihat bahwa perspektif keadilan gender hanya perlu dipakai dan dibawakan oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Sayap Perempuan. Partai politik tidak mampu memaknai pengarusutamaan gender yang seharusnya bermakna keberagaman, yang bisa berlaku untuk berbagai kepentingan dan isu keadilan yang juga

dihadapi para penyandang difabilitas, penganut agama dan kepercayaan yang minoritas, dan orang dengan latar belakang ras, suku, seksualitas, serta kelas sosial yang marginal. Esensi PUG adalah untuk mewujudkan demokrasi deliberatif yang partisipatif dan mendukung adanya perubahan dari sekadar demokrasi teknokratik yang mengelola organisasi dan sumber daya dengan hanya mengikutsertakan kelompok teknokrat saja.

Kita memerlukan konsultasi, dialog, dan deliberasi untuk mentransformasi PUG ke pengarusutamaan dalam keberagaman agar bisa ditransmisi dalam proses pengambilan keputusan di partai serta mencegah PUG di partai hanya menjadi asimilatif terhadap praktik politik yang berjalan selama ini yaitu “tambah perempuan dan aduk” (*add women and stir*) di dalamnya. Dengan demikian peran fokus utama terhadap perempuan di partai dalam wujud Departemen Pemberdayaan Perempuan harus mampu bersinergi, berkonsultasi, dan berdialog dengan segmen partai yang lain. Gagasan untuk memeriksa dan menyeimbangkan praktik kepartaian juga dilakukan dengan mengorganisasi bentuk lain aktivitas politik berupa demokrasi partisipatif yang berorientasi pada keadilan sosial agar representasi demokrasi lewat partai bisa berjalan seimbang. Sasaran penting dari pendekatan ini adalah memiliki basis sosial yang melakukan kontrol terhadap partai secara kolektif dan mengurangi bahaya individu terjebak dalam kekuasaan yang terhegemoni dan terkooptasi. Dalam demokrasi deliberatif/partisipatoris terdapat hasil yang harus ditunda karena adanya perhatian pada ‘proses’. Untuk sementara, sasaran mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya dikesampingkan guna mengakumulasi hasil yang didapat lewat pengorganisasian basis.

Tentu perlu juga kita pertanyakan, apakah aktivis perempuan partai politik mempunyai basis sosial yang menjadi dasar kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar mereka ketika berhadapan dengan partai politik sekaligus berfungsi sebagai alat untuk melatih kekuatan agar bisa membawa dampak secara internal? Hampir semua partai politik di Indonesia bercirikan ‘partai semua isu’ (*catch all party*) dan bertujuan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya sehingga tidak memiliki insentif untuk membangun basis sosial. Kalaupun ada beberapa partai yang membangun basis sosial namun karakter basis sosial yang mereka miliki lebih bersandar pada kelompok fungsional dan untuk pemenuhan kebutuhan praktis, bukan untuk memberdayakan, apalagi melakukan

perubahan politik. Sumbangan pemikiran feminis pada gagasan tentang demokrasi sebaiknya dimaknai dalam lingkup publik dan privat, bukan hanya pada lingkup formal partai dan parlemen tetapi juga informal, yakni dalam asosiasi, organisasi basis, dan sebagainya. Dalam kerja-kerja politik di tingkat basis juga di tingkat formal dalam partai, perempuan bisa membunikan dan mengembangkan konsep-konsep gender pada kerja-kerja yang berwujud pada penugasan fungsional, seperti yang dilakukan Partai Golkar. Namun pada pengorganisasian Cabang Pelopor di PDI-P yang tampak berupaya memperjuangkan kondisi sosial di basis agar dapat sukses bertahan melawan gempuran dari berbagai arah dilakukan melalui kerja-kerja pemberdayaan, penguatan, penyadaran politik tentang peran gender, perbaikan relasi gender, relasi kuasa secara empirik, kondisi budaya, dan norma sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Karakter kerja-kerja ini bisa menjadi sumber kekuasaan dan bisa digunakan untuk merebut ideologi partai. Tanpa membangun basis, akan sulit perempuan memiliki modal untuk meningkatkan representasi mereka. Fokus utama perempuan (*women focal point*) yang ada di dalam partai politik akan lebih banyak berkembang jika mereka mampu memahami kondisi struktural yang menindas perempuan.

Kesulitan partai politik mencari kader di tingkat bawah seharusnya bisa diatasi dengan melakukan ‘pra kondisi’ yaitu menyiapkan masyarakat yang paham akan makna demokrasi, hak-hak politik, dan melahirkan/membentuk kesadaran kritis sebagai warga negara. Sayangnya sekali, tugas membangun basis sosial tidak menjadi fokus utama partai politik. Sampai sekarang, mesin ideologi partai di Indonesia belum memberikan fokus utama membunikan persoalan-persoalan nyata di basis untuk menjadi agenda maupun sikap partai yang masuk akal dan menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan serta diwujudkan, bukan sekadar slogan kosong tanpa makna.

## Penutup

Pengarusutamaan bisa bermakna keberagaman (*diversity*) bukan hanya untuk gender melainkan juga untuk beragam kepentingan dan isu keadilan seperti difabilitas, agama, ras, suku, seksualitas, dan kelas sosial. Ini dapat dimungkinkan karena dalam esensinya pengarusutamaan gender (PUG) bertujuan untuk mencapai demokrasi deliberatif, partisipatif, dan transformatif, sehingga tidak

sekadar teknokratik. Jika strategi PUG dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan heterogenitas perempuan di dalam dan di luar partai politik, serta tidak memedulikan banyak kesenjangan antara kepentingan politik elit perempuan dan kepentingan massa kaum perempuan yang menjadi buruh, petani, nelayan, miskin kota, maka kepentingan politik perempuan dan keterwakilannya hanyalah figur dan tubuh yang berwujud perempuan. Di tengah prinsip neoliberal, pembagian kerja secara seksual terus berlangsung ketika perempuan cenderung ditata hanya menjadi konsumen, pengasuh, perawat, pelayan, pengatur sirkulasi uang kontan dan alat distribusi. Dengan demikian eksploitasi terhadap perempuan berjalan halus hingga perempuan teperdaya dan hanya menjadi pendukung tanpa punya pilihan lain. Karena perempuan dijadikan tiang penyangga ekonomi neoliberal maka di bidang politik perempuan diberikan ruang untuk terlibat dalam proses politik yang lebih banyak berhubungan dengan penyelenggaraan reproduksi sosial, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dan pada posisi politik tertentu, perempuan cukup diwakilkan oleh elit perempuan yang tidak memperjuangkan kepentingan perempuan di luar partai politik.

Kita memerlukan konsultasi, dialog, dan musyawarah untuk mentransformasikan pengarusutamaan gender di tengah kondisi yang heterogen sehingga bisa ditransmisi ke dalam proses pengambilan keputusan di partai politik. Diperlukan upaya mencegah PUG di partai politik yang hanya menjadi penerapan dari praktik politik sekadar menambah perempuan di dalamnya. Partai politik juga diharapkan tidak membuat 'sesuatu' untuk perempuan seperti Departemen Pemberdayaan Perempuan yang sesungguhnya hanyalah satu organ yang 'dikontrol' oleh pemimpin utama partai politik. Adanya *women focal point* (fokus utama perempuan) di Departemen Perempuan partai politik seharusnya adalah untuk memupuk kemampuan bersinergi, berkonsultasi, dan berdialog dengan segmen partai yang lain. Fokus utama perempuan yang ada di dalam partai akan lebih banyak berkembang jika mereka mampu memahami kondisi struktural yang menindas perempuan. Fungsi elektoral partai yang menjadi fokus dari kerja partai saat ini yang hanya menekankan elektabilitas, telah meringgirkan semua proses demokrasi internal di dalam partai, maka ini harus diimbangi dengan mekanisme pemantauan dan pengimbangan, salah satunya melalui upaya pengarusutamaan gender.

Aktivis perempuan di dalam partai politik dan aktivis gerakan perempuan di luar partai politik perlu bersinergi guna memperkuat diri, menemukan sinergi, dan terobosan baru di tengah kepartaian yang tidak kondusif saat ini. Untuk mendukungnya diperlukan redefinisi ideologi feminis dan agenda feminis Indonesia ke depan. Selain itu, aktivis perempuan di luar partai politik selayaknya dapat bekerja sama dengan Departemen Perempuan dalam partai politik untuk memperjuangkan masuknya isu perempuan ke dalam ideologi partai politik. Pilihan strategi bisa beragam meski memang masih perlu diuji apakah bisa dilaksanakan dan efektif untuk mencapai tujuan besar ke arah keadilan gender sekaligus menjawab tantangan prioritas politik seperti apa yang akan dijawab. Gerakan perempuan juga perlu memperkuat gerakan sosial (*social movement*) yang membentuk tindakan kolektif untuk menjadi basis konstituen yang mampu menjaga kepentingan partai politik, kepentingan perempuan, dan tujuan jangka panjang. Kepada perempuan yang akan terjun ke partai politik, mereka harus mampu mempertegas diri sendiri apa yang menjadi kepentingan dirinya sebagai perempuan (*women interest*), apa yang akan diperjuangkan, apa yang ingin dicapai melalui partai politik, dan bagaimana ideologi gendernya? Dan pertanyaan terbuka pun harus diajukan untuk menjadi refleksi bersama dan tantangan untuk dijawab bahwa apakah menjadi tugas partai politik untuk membentuk basis sosial bagi perempuan ataukah si aktivis perempuan yang berupaya membentuk basis sosial?

## Daftar Pustaka

- Alvarez, S.E. (1990) *Engendering democracy in Brazil, women's movements in transition*. New Jersey: Princeton Univ. Press.
- Bacchi, C.L. (1996). *The politics of affirmative action*. London: Sage.
- Bacchi, C.L. (1999). *Women, policy and politics, the construction of policy problem*. London: Sage.
- Bystydzienski, J.M. (1992 ). *Women transforming politics: world wide strategies for empowerment*. Bloomington: Indiana Univ. Press.
- Firmanzah (2008). *Mengelola partai politik, komunikasi dan positioning ideologi politik di era demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gelb, J. (1989). *Feminism and politics*. London: Univ. of California Press.
- Holstrom, N. Ed. (2002). *The Socialist feminist project, a contemporary reader in theory and politics*. Monthly Review Press. New York
- Jaquette, J.S. (Ed. ) (2009). *Feminist agendas and democracy in*

- Latin America*. London: Duke Univ. Press.
- Lovenduski, J. and Norris, P (1993). *Gender and Party Politics*. London: Sage.
- (1995). *Political recruitment: gender, race and class in the British Parliament*. Cambridge.
- Lovenduski, J. (2008). Politik berparas perempuan. Jakarta: Kanisius. Translation of *Feminizing Politics* Minichiello, V. et.al. (1995) *In Depth interviewing: principles techniques, analysis* 2<sup>nd</sup> ed. Perth: Longman Australia.
- Michels, R (1962). *Political parties, a sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracy*. London: The Free Press.
- Nelson, B.J. (1994). *Women and politics worldwide*. New Haven: Yale Univ. Press.
- Phillips, A. (1991). *Engendering democracy*. Cambridge: Blackwell.
- Poerwandari, E.K. (2005). *Penelitian kualitatif untuk penelitian perilaku manusia* edisi ke-3. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Sadli, S. & Porter, M. (1999). *Metodologi penelitian berperspektif perempuan dalam riset sosial*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI.
- Sarantakos, S. (1993). *Social research*. Melbourne: Univ. Press.
- Soetjipto, A. (2011). *Politik harapan*. Jakarta: Margin Kiri.
- Strauss, A. & Corbin (1990). *Basic of qualitative: grounded theory procedures and techniques*. Newbury Park: Sage.
- Squires, J. (2007). *The New politics of gender equality*. New York: Palgrve MacMillan.
- Young, I.M. (1990). *Justice and the politics of difference*. New Jersey: Pricenton Univ. Press.



### **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

- Prof. Mayling Oey-Gardiner
  - Prof. Merlyna Lim
  - Dr. Kristi Poerwandari
  - Dr. Ida Ruwaida Noor
  - Dr. Arianti Ina Restiani
  - Dr. Phil. Ratna Noviani
- Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Belakang** (*end-note*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia, 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum, 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al., 2003) untuk lebih dari dua pengarang. Contoh:  
Arivia, Gadis. 2003. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Amnesty International. 2010. *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*. Diakses pada 5 Maret, jam 21.10 WIB dari:  
[http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, Dewi (Ed). 2014. *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan.  
Dhewy, Anita. 2014. "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election" dalam *Indonesian Feminist Journal* Vol.2 No.2 August 2014. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan Press. (pp: 130-147).  
KOMPAS. "Sukinah Melawan Dunia". 18 Desember 2014:14:02 WIB.  
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

<b>Catatan Jurnal Perempuan: "Kursi"</b> .....	iii-iv
<b>Artikel / Articles</b>	
• Status Perempuan sebagai Warga Negara dalam Paradigma Inclusive Citizenship / <i>Status of Women as Citizen in the Paradigm of Inclusive Citizenship</i> .....	81-91
<i>Baiq L.S.W. Wardhani</i>	
• Partisipasi Politik Perempuan Dalam Praktik Kewarganegaraan di Indonesia / <i>Women's Political Participation in the Practice of Citizenship in Indonesia</i> .....	93-101
<i>Partini</i>	
• Kepentingan Politik Perempuan dalam Partai: Strategi Gender / <i>Women's Political Interest in Political Parties: a Gender Strategy</i> .....	103-115
<i>Shelly Adelina &amp; Ani Soetjipto</i>	
• Wajah Aktivistis Perempuan dalam Parlemen: Prestasi & Rekomendasi Politik / <i>Faces of Women's Activists in the Parliament: Achievements and Political Recommendations</i> .....	117-127
<i>Aditya Perdana</i>	
• Perempuan Politisi dalam Partai Politik Pemilu 2014: Keterwakilan Deskriptif vs Substantif / <i>Women's Politicians in 2014 Political Parties: Descriptive versus Substantive Representations</i> .....	129-143
<i>Nuri Soeseno</i>	
• Politik Berbasis Komunitas: Pemberdayaan Perempuan Pemimpin di Yogyakarta / <i>Community-Based Politics: Empowering Women's Leaders in Yogyakarta</i> .....	145-151
<i>Any Sundari</i>	
• Bagaimana Wajah Caleg Perempuan dalam Pemilu 2014? / <i>How is the Faces of Women's Candidates in 2014 General Election?</i> .....	153-160
<i>Elisabeth Anita Dhewy Haryono</i>	
<b>Wawancara / Interview</b>	
• Jeffrey Winters: Pentingnya Intervensi Negara dalam Kuota Politik Perempuan / <i>Jeffrey Winters: The Importance of State's Intervention in Quota of Women's Political Representation</i> .....	161-164
<i>Dewi Candraningrum</i>	
<b>Kata dan Makna / Words and Meanings</b> .....	165-166
<b>Profil / Profile</b>	
• Binny Bintarti Buchori: Bagaimana Seharusnya Politik Bekerja? .....	167-170
<i>Mariana Amiruddin</i>	
<b>Resensi Buku/ Book Review</b>	
• Hambatan Kemandirian Politik Perempuan / <i>Barriers to Women's Political Independence</i> .....	171-173
<i>Astuti Parengkuh</i>	

